

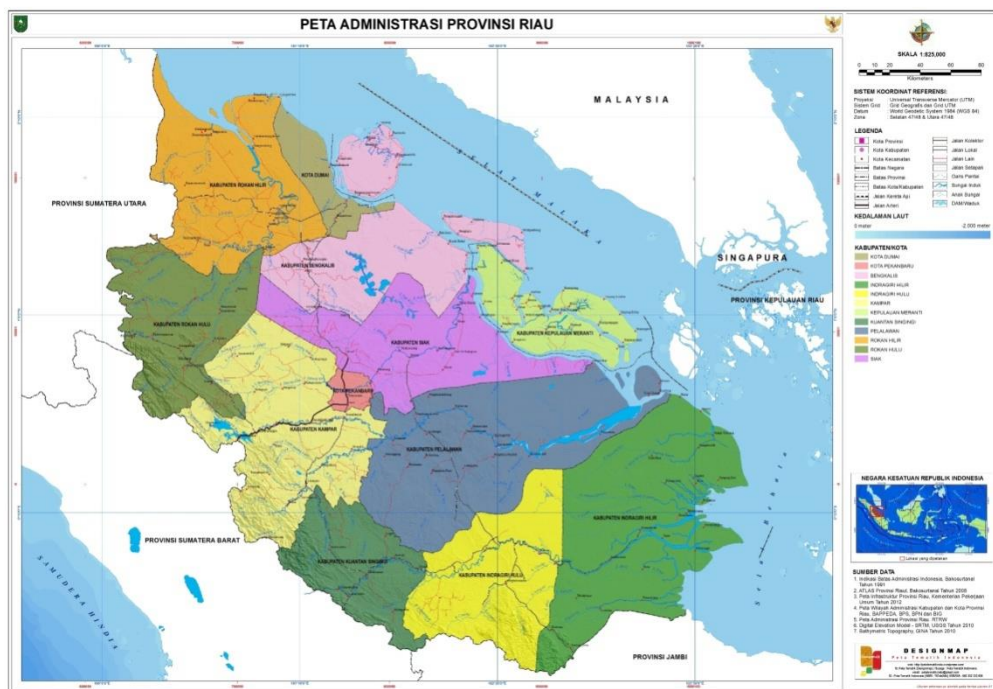
BAB IV

GAMBARAN UMUM

Pada bab IV ini penulis akan menyajikan gambaran umum obyek/subyek yang meliputi kondisi Geografis, kondisi perekonomian, kondisi belanja daerah, kondisi ketenagakerjaan dan kondisi investasi.

A. Kondisi Geografis Provinsi Riau

Berikut ini merupakan peta Provinsi Riau yang terdiri dari 10 Kabupaten dan 2 Kota :



GAMBAR 4.1
Peta Kabupaten/Kota Provinsi Riau

Berdasarkan data dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau, Provinsi Riau memiliki luas area sebesar 8.915.016 Hektar. Keberadaannya membentang dari lereng Bukit Barisan sampai dengan Selat Malaka, terletak antara 01°05'00'' Lintang Selatan sampai 02°25'00'' Lintang Utara atau antara 100°00'00'' Bujur Timur sampai 105°05'00'' Bujur Timur.

Di daerah daratan terdapat 15 sungai, di antaranya ada 4 sungai yang mempunyai arti penting sebagai prasarana perhubungan seperti Sungai Siak (300 km) dengan kedalaman 8-12 meter, Sungai Rokan (400 km) dengan kedalaman 6-8 meter, Sungai Kampar (400 km) dengan kedalaman lebih kurang 6 meter dan Sungai Indragiri (500 km) dengan kedalaman 6-8 meter. Ke empat sungai yang membelah dari pegunungan dataran tinggi Bukit Barisan bermuara di Selat Malaka dan Laut Cina Selatan itu dipengaruhi pasang surut laut. Batas-batas daerah Riau adalah:

- Sebelah Utara:

Selat Malaka dan Provinsi Sumatera Utara

- Sebelah Selatan:

Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Barat

- Sebelah Timur:

Provinsi Kepulauan Riau dan Selat Malaka

- Sebelah Barat:

Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Sumatera Utara

Pada Tahun 2013 penduduk Provinsi Riau mengalami peningkatan sebesar 3,79 persen dari tahun 2012 sebesar 5.929.173 jiwa menjadi 6.146.664 jiwa Tahun 2013. Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 3.159.524 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 2.987.139 jiwa atau dengan kata lain rasio jenis kelamin (*sex ratio*) sebesar 105,77. Kondisi ini melampaui jumlah proyeksi penduduk Provinsi Riau yang diperkirakan berjumlah 5.764.700 jiwa (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional).

Pertumbuhan penduduk Provinsi Riau yang relatif tinggi ini dipengaruhi oleh tingginya tingkat migrasi penduduk dari luar Provinsi Riau, sementara penduduk yang keluar dari Provinsi Riau relatif sedikit. Jika diimbangi dengan kemampuan serta kemampaun untuk membuka lapangan usaha baru, migrasi penduduk ke Provinsi Riau akan menjadi potensi yang positif bagi perkembangan daerah, namun pada umumnya migrasi penduduk ke Provinsi Riau datang dengan bekal keterampilan yang kurang memadai sehingga tidak jarang menimbulkan persoalan-persoalan sosial yang kurang menguntungkan bagi pelaksanaan proses pembangunan.

Besaran jumlah penduduk sebanyak 6.146.664 jiwa dan luas wilayah Provinsi Riau sebesar 8.915.016 ha atau seluas 89.150,16 Km², maka kepadatan rata-rata penduduk Provinsi Riau untuk tahun 2013 adalah sebesar 68,95 jiwa/km². Berdasarkan tabel I-3, Pekanbaru sebagai ibu kota Provinsi memiliki jumlah penduduk yang terbanyak mencapai 999.940 jiwa, memiliki kepadatan tertinggi mencapai 1.579,66 jiwa/km².

B. Profil Kabupaten/Kota Provinsi Riau

1. Kota Pekanbaru

Luas wilayah Kota Riau meliputi 632,26 km² dan letak kota pun strategis, berada di simpul segi tiga pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Singapura, dan di jalur lalu lintas angkutan lintas timur Sumatera.

Pekanbaru diproyeksikan menjadi kota jasa. Sehingga konsekuensinya kota harus membenahi diri dengan meningkatkan fasilitas penunjang perkotaan. Saat ini Pekanbaru sudah memiliki fasilitas penunjang yang lumayan memadai. Selain perusahaan jasa seperti perbankan, asuransi, perusahaan perdagangan valuta asing, serta jasa industri lainnya, banyak pula perusahaan besar membuka kantor pusat dan kantor cabang di sini.

Sektor yang memberikan kontribusi terbesar bagi PDRB Kota Pekanbaru adalah sektor perdagangan, hotel, dan restoran yaitu sebesar 26 persen dari PDRB. Sektor yang juga berkontribusi besar lainnya adalah sektor keuangan, sewa, dan jasa sebesar 20 persen. Sektor angkutan dan komunikasi sebesar 18 persen. Berikut kecamatan di Kabupaten Bengkalis: Tampan, Bukit Raya, Lima Puluh, Sail, Pekanbaru Kota, Sukajadi, Senapelan dan Rumbai.

2. Kabupaten Bengkalis

Kabupaten Bengkalis dengan ibukota Bengkalis merupakan salah satu dari 12 kabupaten/kota di Provinsi Riau. Wilayahnya mencakup daratan bagian pesisir Timur pulau Sumatera. Secara Geografis, posisi wilayah Kabupaten Bengkalis pada posisi 2°30′-0°17′ Lintang Utara dan 100°52′-

102°10' Bujur Timur, Wilayah Kabupaten Bengkalis terdiri dari pulau dan daratan serta memiliki kawasan pesisir dan laut dengan garis pantai sepanjang 446 Km.

Kabupaten Bengkalis memiliki letak yang sangat strategis, berada di tepi alur pelayaran internasional, yang paling sibuk di dunia, yakni Selat Malaka serta berada pada kawasan segitiga pertumbuhan ekonomi Indonesia-Malaysia-Singapura (IMS-GT). Berikut kecamatan di Kabupaten Bengkalis: Bantan, Bengkalis, Bukitbatu, Mandau, Rupat, Rupat Utara, Pinggir dan Siak Kecil.

3. Kabupaten Indragiri Hulu

Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) resmi menjadi Daerah Tingkat II berdasarkan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1948.

Luas wilayah Indragiri Hulu meliputi 8.198.26 km² (819.826,0 Ha) yang terdiri dari daratan rendah, daratan tinggi rawa-rawa dengan ketinggian 50-100m di atas permukaan laut. Kabupaten Indragiri Hulu terletak di 0°15' Lintang Utara, 1°5' Lintang Selatan, 101°10' Bujur Timur, dan 102°48' Bujur Timur.

Wilayah ini berbatasan, sebelah Utara dengan kabupaten Pelalawan, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bungo Tebo (Provinsi Jambi), Barat dengan Kabupaten Kuantan Singingi dan sebelah Timur dengan Kabupaten Indragiri Hilir. Berikut Kecamatan di Kabupaten Inhu: Kecamatan Rengat, Kecamatan Rengat Barat, Kecamatan Pasir Penyau, Kecamatan Peranap, Kecamatan Lirik, Kecamatan Kelayang, Kecamatan

Seberida, Kecamatan Batang Gansal, Kecamatan Batang Cenaku, Kecamatan Kuala Cenaku, Kecamatan Batang Peranap, Kecamatan Rakit Kulim, Kecamatan Lubuk Batu Jaya dan Kecamatan Sungai Lala.

4. Kabupaten Indragiri Hilir

Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) resmi menjadi Daerah Tingkat II berdasarkan Undang-undang No. 6 Tahun 1965 tanggal 14 Juni 1965 (LN RI No. 49).

Indragiri Hilir terletak di pantai Timur pulau Sumatera, merupakan gerbang selatan Provinsi Riau, dengan luas daratan 11.605,97 km² dan perairan 7.207 Km² berpenduduk kurang lebih 683.354 jiwa yang terdiri dari berbagai etnis, Indragiri Hilir yang sebelumnya dijuluki "Negeri Seribu Parit" yang sekarang terkenal dengan julukan "NEGERI SERIBU JEMBATAN" dikelilingi perairan berupa sungai-sungai besar dan kecil, parit, rawa-rawa dan laut, secara fisiografis Kabupaten Indragiri Hilir beriklim tropis merupakan sebuah daerah dataran rendah yang terletak diketinggian 0-4 meter di atas permukaan laut dan dipengaruhi oleh pasang surut.

Berikut daftar kecamatan di Kabupaten Inhil: Reteh, Kuala Enok, Kuindra, Tembilahan, Tempuling, Gaung Anak Serka, Mandah, Kateman, Keritang, Tanah Merah, Batang Tuaka, Gaung, Tembilahan Hulu, Kemuning, Pelangiran, Teluk Belengkong, Kempas, Pulau Burung, Concong dan Sungai Batang.

5. Kabupaten Kampar

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Militer Sumatera Tengah Nomor: 10/GM/STE/49 Tanggal 9 November 1949, Kabupaten Kampar merupakan salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi Riau terdiri dari Kewedanaan Palalawan, Pasir Pangarayan, Bangkinang dan Pekanbaru Luar Kota dengan Ibu Kota Pekanbaru. Kemudian berdasarkan Undang-undang No. 12 Tahun 1956 Ibu Kota Kabupaten Kampar dipindahkan ke Bangkinang dan baru terlaksana tanggal 6 Juni 1967.

Semenjak terbentuk Kabupaten Kampar pada tahun 1949 sampai tahun 2006 sudah 21 kali masa jabatan bupati kepala daerah. Sampai jabatan bupati yang keenam (H. Soebrantas S) Ibu Kota Kabupaten Kampar dipindahkan ke Bangkinang berdasarkan UU No. 12 tahun 1956.

Berikut daftar kecamatan di Kabupaten Kampar: Bangkinang, Bangkinang Barat, Bangkinang Seberang, Gunung Sahilan, Kampar, Kampar Kiri, Kampar Kiri Hilir, Kampar Kiri Hulu, Kampar Timur, Kampar Utara, Perhentian Raja, Rumbio Jaya, Salo, Siak Hulu, Tambang, Tapung, Tapung Hilir, Tapung Hulu, Kota Kampar, Kampar Kiri Tengah dan Koto Kampar Hulu.

6. Kota Dumai

Dumai menurut cerita rakyat tentang Puteri Tujuh, berasal dari kata di lubuk dan umai (sejenis binatang landak) yang mendiami lubuk tersebut. Karena sering diucapkan cepat, lama kelamaan kata-kata tersebut bertaut menjadi D'umai dan selanjutnya menjadi Dumai.

Pada era tahun 1930-an, Dumai merupakan suatu dusun nelayan kecil yang terdiri atas beberapa rumah nelayan. Penduduknya bertambah ketika Jepang mendatangkan kaum romusha (pekerja paksa zaman penjajahan Jepang) dari Jawa. Berikut daftar kecamatan di Kota Dumai: Dumai Kota, Dumai Selatan, Sungai Sembilan, Medang Kampai, Bukitkapur, Dumai Timur dan Dumai Barat.

7. Kabupaten Kuantan Singingi

Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) secara geografis, geoekonomi dan geopolitik terletak pada jalur tengah lintas sumatera dan berada dibagian selatan Provinsi Riau, yang mempunyai peranan yang cukup strategis sebagai simpul perdagangan untuk menghubungkan daerah produksi dan pelabuhan, terutama pelabuhan Kualaenok.

Dengan demikian Kabupaten Kuantan Singingi mempunyai peluang untuk mengembangkan sektor-sektor pertanian secara umum, perdagangan barang dan jasa, transportasi dan perbankan serta pariwisata.

Kabupaten Kuantan Singingi merupakan pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu yang dibentuk berdasarkan UU No. 53 tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Siak, Natuna, Karimun, Kuantan Singingi dan Kota Batam. Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari 12 (dua belas) kecamatan dengan luas wilayah 7,656,03 km², yang berada pada posisi antara 0000 -10 00 Lintang Selatan dan 1010 02 - 1010 55 Bujur Timur. Berikut daftar kecamatan di Kabupaten Kuansing: Benai, Cerenti, Gunung Toar, Hulu Kuantan,

Inuman, Kuantan Hilir, Kuantan Mudik, Kuantan Tengah, Logas Tanah Darat, Pangean, Singingi dan Singingi Hilir.

8. Kabupaten Pelalawan

Kabupaten Pelalawan dibentuk berdasarkan UU. No. 53 Tahun 1999, yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Kampar, dan diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 12 Oktober 1999. Sementara peresmian operasionalnya dilakukan oleh Bapak Gubernur Riau pada tanggal 5 Desember 1999, dengan Pangkalankerinci sebagai Ibu Kota Kabupaten Pelalawan.

Pembentukan Kabupaten Pelalawan atas dasar kesepakatan dan kebulatan tekad bersama yang dilakukan melalui musyawarah besar masyarakat Kampar Hilir pada tanggal 11 s/d 13 April 1999 di Pangkalankerinci.

Rapat tersebut menghadirkan seluruh komponen masyarakat yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh pemuda, lembaga-lembaga adat, kaum intelektual, cerdik pandai dan alim ulama. Dari musyawarah besar tersebut ditetapkan Pelalawan yang bermula dari Kerajaan Pekantua, yang melepaskan diri dari Kerajaan Johor tahun 1699 M, kemudian berkuasa penuh atas daerah ini. Berikut daftar kecamatan di Kabupaten Pelalawan: Langgam, Pangkalankerinci, Bandar Sei Kijang, Pangkalankuras, Ukui, Pangkalanlesung, Bunut, Pelalawan, Bandar Petalangan, Kerumutan, Telukmeranti dan Kualakampar.

9. Kabupaten Rokan Hulu

Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), merupakan sebuah kabupaten hasil pemekaran Kabupaten Kampar, yang berdiri pada tanggal 12 Oktober 1999 berdasarkan kepada UU Nomor 53 tahun 1999 dan UU No 11 tahun 2003 tentang perubahan UU RI No 53 tahun 1999, yang diperkuat dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 010/PUU-1/2004, tanggal 26 Agustus 2004.

Kabupaten yang diberi julukan sebagai "Negeri Seribu Suluk" ini mempunyai penduduk sebanyak 515.724 jiwa dengan luas wilayah 7.449,85 km², dimana 85% terdiri dari dataran dan 15% rawa-rawa dan perairan. Berikut daftar kecamatan di Kabupaten Rohul: Bangun Purba, Bonai Darussalam, Kabun, Kepenuhan, Kepenuhan Hulu, Kunto Darussalam, Pagaran Tapah Darussalam, Pendalian Koto, Rambah, Rambah Hilir, Rambah Samo, Rokan Koto, Tambusai, Tambusai Utara, Tandun dan Ujung Batu.

10. Kabupaten Rokan Hilir

Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) dibentuk dari tiga kenegerian, yaitu negeri Kubu, Bangko dan Tanahputih. Negeri-negeri tersebut dipimpin oleh seorang Kepala Negeri yang bertanggung jawab kepada Sultan Kerajaan Siak. Distrik pertama didirikan Belanda di Tanahputih pada saat menduduki daerah ini pada tahun 1980.

Setelah Bagansiapiapi yang dibuka oleh pemukim-pemukim Cina berkembang pesat, maka Belanda memindahkan Pemerintahan

Kontroler-nya ke Kota Bagansiapiapi pada tahun 1901. Bagansiapiapi semakin berkembang setelah Belanda membangun pelabuhan modern dan terlengkap dikota Bagansiapiapi guna mengimbangi pelabuhan lainya di Selat Malaka hingga Perang Dunia Pertama usai. Setelah kemerdekaan Indonesia, Rokan Hilir digabungkan kedalam Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau.

Bekas wilayah Kewedanaan Bagansiapiapi yang terdiri dari Kecamatan Tanahputih, Kubu dan Bangko serta kecamatan Rimba Melintang dan Kecamatan Bagan Sinembah kemudian pada tanggal 4 Oktober 1999 ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai Kabupaten Baru di Provinsi Riau sesuai dengan Undang-undang Nomor 53 tahun 1999. Selanjutnya dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 ditetapkan Bagansiapiapi sebagai Ibukota Kabupaten Rokan Hilir. Berikut daftar kecamatan di Kabupaten Rohil: Bangko, Sinaboi, Rimbamelintang, Bangkopusako, Tanahputih Tanjungmelawan, Tanahputih, Bagansinembah, Pujud, Simpang Kanan, Pasirlimau Kapas, Batuhampar, Rantaukopar dan Pekaitan.

11. Kabupaten Siak

Bentang alam Kabupaten Siak sebagian besar terdiri dari dataran rendah di bagian Timur dan sebagian dataran tinggi di sebelah barat. Pada umumnya struktur tanah terdiri dan tanah podsolik merah kuning dan batuan, dan alluvial serta tanah organosol dan gley humus dalam bentuk rawa-rawa atau tanah basah.

Lahan semacam ini subur untuk pengembangan pertanian, perkebunan dan perikanan. Daerah ini beriklim tropis dengan suhu udara antara 25° - 32° Celsius, dengan kelembaban dan curah hujan cukup tinggi.

Sungai Siak sendiri terkenal sebagai sungai terdalam di tanah air, sehingga memiliki nilai ekonomis yang tinggi, terutama sebagai sarana transportasi dan perhubungan. Namun potensi banjir diperkirakan juga terdapat pada daerah sepanjang Sungai Siak, karena morfologinya relatif datar. Berikut daftar kecamatan di Kabupaten Siak: Siak, Sungai Apit, Pusako, Bungaraya, Dayun, Sungai Mandau, Sabak Auh, Mempura, Kotogasib, Tualang, Kerinci Kanan, Minas dan Kandis.

12. Kabupaten Kepulauan Meranti

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) atas nama Presiden Susilo Bambang Yudoyono secara resmi melantik enam bupati dan satu wali kota daerah pemekaran pada tahun 2009 di Jakarta. Salah satu yang menjabat bupati daerah pemekaran baru tersebut adalah Drs Syamsuar untuk Plt Bupati Kepulauan Meranti, Provinsi Riau.

Mendagri Mardiyanto dalam amanatnya mengatakan, pemekaran wilayah diharapkan akan meningkatkan segala percepatan pembangunan, pemerataan pembangunan serta pelayanan yang selama ini dikeluhkan akan tercapai. Sehingga pejabat yang telah dilantik ini kiranya mampu memanfaatkan tugas tersebut dengan baik. Berikut daftar kecamatan di Kabupaten Kepulauan Meranti: Tebingtinggi, Tebingtinggi Barat,

Rangsang, Rangsang Barat, Merbau, Pulau Merbau, Tebingtinggi Timur dan Putri Puyu.

C. Kondisi Perekonomian

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator pertumbuhan ekonomi suatu wilayah atau daerah. PDRB adalah jumlah nilai tambah bruto yang dihasilkan seluruh unit usaha dalam wilayah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga pada setiap tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar penghitungannya.

PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran struktur ekonomi, sedangkan harga konstan dapat digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Dengan demikian, PDRB merupakan indikator untuk mengukur sampai sejauh mana keberhasilan pemerintah dalam memanfaatkan sumber daya yang ada dan dapat digunakan sebagai perencanaan dan pengambil keputusan.

Pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan seri 2000 dari 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Riau tahun 2007 sampai tahun 2014. Dari Tabel 4.1 terlihat bahwa secara umum nilai PDRB di 12 Kabupaten/Kota di

Provinsi Riau tahun 2007 sampai tahun 2014 mengalami kenaikan setiap tahunnya. Kabupaten Bengkalis menghasilkan nilai PDRB terbesar setiap tahunnya dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya. Sementara nilai PDRB terkecil ada di Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2014 hal ini disebabkan karena Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan pemekaran dari Kabupaten Bengkalis yang dibentuk pada tanggal 19 Desember 2008, dasar hukum berdirinya kabupaten Kepulauan Meranti adalah Undang-undang nomor 12 tahun 2009 pada tanggal 16 Januari. Berikut ini merupakan tabel PDRB Kabupaten/Kota Provinsi Riau dalam Milyar Rupiah:

Tabel 4.1
PDRB Provinsi Riau Atas Dasar Harga Konstan 2000
Menurut Kabupaten/Kota 2007-2014 (Milyar Rupiah)

No	Kabupaten/Kota	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	Kuantan Singingi	2512	2719	2907	3111	3339	3586	3843	4025
2	Indragiri Hulu	3469	3723	3993	4220	4534	4868	5198	5432
3	Indragiri Hilir	5416	5847	6264	6722	7218	7757	8303	8709
4	Pelalawan	2671	2857	3088	3296	3521	3768	4034	4226
5	Siak	14748	15417	14994	13673	13640	13897	13464	13576
6	Kampar	7828	8279	8894	9163	9730	10247	10723	11189
7	Rokan Hulu	2272	2426	2584	2707	2949	3121	3323	3470
8	Rokan Hilir	10797	11336	11535	11385	11522	11597	11761	11905
9	Bengkalis	25328	26417	26812	27792	30398	29894	28038	30478
10	Kepulauan Meranti	-	-	-	2135	2262	2375	2441	2561
11	Kota Pekanbaru	6997	7630	8303	9048	9913	10961	11949	12561
12	Kota Dumai	3303	3474	3569	3716	3902	4113	4329	4442
	Total	85341	90125	92943	96968	102928	106183	107407	112574

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2015 data diolah

Nilai PDRB antar Kabupaten/Kota sangat tergantung pada sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki, serta ditunjang dengan teknologi yang tersedia. Dalam luas wilayah Kabupaten Bengkalis menempati

urutan kedua setelah Kabupaten Indragiri Hilir dan ternyata malah memiliki nilai PDRB yang paling tinggi, hal ini disebabkan di Kabupaten Bengkalis kaya akan sumber daya alam seperti sektor pertambangan dan pertanian. Dalam sektor pertambangan, minyak mentah menjadi penyumbang utama dari PDRB tetapi peningkatan dan penurunan pendapatan tergantung pada hasil produksi minyak mentah pada setiap tahunnya. Disusul dari sektor pertanian seperti kelapa sawit dan karet yang menjadi penyumbang kedua dari sektor pertambangan yaitu minyak mentah.

D. Kondisi Belanja Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan penyusunan APBD berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang merupakan kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD.

Mekanisme penyusunan perencanaan dan penganggaran, serta alokasi belanja diklasifikasikan menurut kelompok, jenis, objek dan rincian objek belanja sesuai dengan prioritas program/kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran. Kebijakan belanja daerah Tahun Anggaran 2013 akan dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah yang terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung.

Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal yang dilaksanakan secara terukur dengan capaian prestasi kerja yang telah ditetapkan.

Tabel 4.2
Realisasi Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau
Menurut Jenis Pengeluaran 2007-2014 (Juta rupiah)

No	Kabupaten/Kota	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	Bengkalis	1410	2573	2801	1941	2882	3736	3686	4677
2	Indragiri Hilir	900	870	969	943	1229	1436	1524	2071
3	Indragiri Hulu	594	849	1099	681	862	1071	1467	1713
4	Kampar	1377	1494	1435	1779	1834	1683	1810	2419
5	Kuantan Singingi	823	844	900	794	882	988	1257	1378
6	Pelalawan	840	735	795	755	1011	1344	1345	2087
7	Rokan Hilir	2057	2028	1673	2398	1627	2269	2281	2712
8	Rokan Hulu	858	829	933	986	962	1186	1452	1758
9	Siak	1931	1791	1929	1697	1676	2139	2285	2680
10	Dumai	848	656	719	650	752	915	1212	1341
11	Pekanbaru	1123	650	1145	1193	1447	1583	1938	2786
12	Kepulauan Meranti	-	-	-	368	792089	1114	1002	1616
	Total	12766	13325	732716	14191	807259	19468	21265	27245

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2015 data diolah

Sedangkan Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan program dan kegiatan. Belanja tidak langsung didasarkan atas kebijakan mengalokasikan belanja wajib/mengikat meliputi belanja pegawai, belanja bunga yang dialokasikan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman, menganggarkan bantuan biaya

produksi tertentu agar harga jual yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat, serta belanja hibah dianggarkan untuk pemberian hibah dalam bentuk uang yang bersifat spesifik dan telah ditetapkan peruntukannya.

E. Kondisi Ketenagakerjaan

Jumlah penduduk Provinsi Riau menurut hasil Sensus Penduduk 2010 (SP 2010) adalah 5.538.367 jiwa, terdiri dari 2.853.168 laki-laki dan 2.685.199 perempuan. Sementara banyaknya rumah tangga yang terdapat di Provinsi Riau pada tahun 2014 tercatat 1.485.232 rumah tangga dengan rata-rata penduduk 4 jiwa per rumah tangga.

Sensus Penduduk (SP) dilaksanakan 10 tahun sekali. Dan berdasarkan Proyeksi Penduduk Indonesia Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2010 sampai 2020, proyeksi penduduk Riau tahun 2014 berjumlah 6.188.442 jiwa. Distribusi penduduk 2014 menurut Kabupaten/Kota menunjukkan bahwa penduduk Riau terkonsentrasi di Kota Pekanbaru sebagai ibukota provinsi dengan jumlah penduduk 1.011.467 jiwa atau sekitar 16,34 persen dari seluruh penduduk Riau. Sedangkan Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk terkecil adalah Kabupaten Kepulauan Meranti sebesar 179.894 jiwa.

Tenaga Kerja pada penelitian ini dilihat berdasarkan jumlah penduduk yang bekerja menurut Kabupaten/Kota Provinsi Riau tahun 2007 sampai tahun 2014 yang disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 4.3
Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Kegiatan Utama
Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin

No	Kabupaten/Kota	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	Kuantan Singingi	59.88	58.68	56.85	57.05	64.78	63.59	64.42	65.25
2	Indragiri Hulu	60.51	58.81	55.84	56.48	63.65	59.56	60.18	60.8
3	Indragiri Hilir	62.7	62.62	64.16	64.54	63.21	61.86	67.27	72.68
4	Pelalawan	61.32	60.06	62.63	58.49	66.14	65.39	63.3	61.21
5	Siak	60.5	60.83	55.15	60.1	65.28	60.83	58.57	56.31
6	Kampar	57.38	59.23	57.05	54.73	63.49	57.27	59.32	61.37
7	Rokan Hulu	59.72	59.23	55.58	54.44	65.09	56.8	56.6	56.4
8	Bengkalis	54.76	57.98	55.15	57.4	62.99	63.26	56.38	56.4
9	Rokan Hilir	50.63	52.61	53.27	54.66	63.16	58.63	57.46	49.5
10	Kepulauan Meranti	0	0	0	60.96	62.37	64.9	65.61	56.29
11	Kota Pekanbaru	47.82	51.51	53.19	60.77	58.18	58.35	57.88	57.41
12	Kota Dumai	49.95	55.7	54.63	53.32	62.25	60.36	57.98	55.6
	Total	625.17	637.26	623.5	692.94	760.59	730.8	724.97	709.22

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2015 data diolah

F. Kondisi Indeks Pembangunan Manusia

Tingkat pembangunan manusia yang relatif tinggi akan mempengaruhi kinerja pertumbuhan ekonomi melalui kapabilitas penduduk dan konsekuensinya adalah peningkatan produktivitas dan kreativitas masyarakat. Dengan meningkatnya produktivitas dan kreativitas tersebut, penduduk dapat menyerap dan mengelola sumberdaya yang penting bagi pertumbuhan ekonomi (Brata, 2004).

Tabel 4.4
Persentase Indeks Pembangunan Manusia menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Riau Tahun 2007-2014

Kabupaten/Kota	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kuantan Singingi	72.47	72.95	73.38	73.70	74.15	74.50	74.77	75.23
Indragiri Hulu	72.96	73.43	73.89	74.18	74.54	74.90	75.21	76.14
Indragiri Hilir	73.87	74.41	74.95	75.24	75.71	76.15	76.41	76.75
Pelalawan	71.43	72.07	72.69	73.18	73.59	73.92	74.27	74.53
Siak	75.15	75.64	76.05	76.46	76.92	77.27	77.44	77.65
Kampar	72.98	73.64	74.14	74.43	75.18	75.54	75.83	76.18
Rokan Hulu	71.43	71.84	72.29	72.66	73.10	73.62	73.87	74.16
Bengkalis	73.36	74.12	74.64	75.11	75.53	75.86	76.12	76.48
Rokan Hilir	71.06	71.51	71.98	72.43	72.83	73.17	73.45	73.74
Kepulauan Meranti	-	-	70.15	70.62	71.08	71.47	71.80	72.24
Pekanbaru	76.98	77.54	77.86	78.27	78.72	79.16	79.47	79.75
Dumai	76.31	76.91	77.33	77.75	78.25	78.73	78.99	79.43

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2015 data diolah

Faktanya, indeks pembangunan manusia Kab/Kota di Provinsi Riau dari tahun 2007 sampai 2014 meningkat dari tahun ke tahun dan pergerakannya sangat stabil. Indeks pembangunan manusia untuk masing-masing di Provinsi Riau sangat bervariasi, dimana Kota Pekanbaru adalah yang paling tertinggi dengan jumlah persentase sebesar 79.75 persen dan diikuti oleh Kota Dumai sebesar 79.43 persen. Sedangkan jumlah indeks pembangunan terendah yaitu Kabupaten Kepulauan Meranti dikarenakan Kabupaten Kepulauan Meranti adalah Kabupaten hasil dari pemekaran.